

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Reformasi bidang pendidikan merupakan salah satu agenda reformasi nasional. Kualitas layanan pendidikan ditingkatkan terus-menerus dan berkelanjutan. Tujuannya adalah peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Dengan demikian, penyelenggaraannya memberi manfaat langsung bagi masyarakat yang merupakan hak dasarnya dan negara mengatur hak setiap warga itu untuk mendapatkan pendidikannya.

Pendidikan dipandang sebagai salah satu wahana yang paling baik untuk menghasilkan masyarakat baru atau penerus baru masa depan yang tidak akan menghilangkan ikatan budaya atau kebiasaan yang telah dimiliki oleh dirinya sendiri, tetapi juga tidak bodoh secara intelektual. Artinya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan sangat bergantung pada sejauhmana pendidikannya. Manusia tanpa pendidikan diyakini akan sama saja dengan keadaan manusia masa dahulu yaitu sekumpulan manusia yang memiliki keteringgalan yang sangat jauh dari yang seharusnya, baik kehidupannya maupun tertinggal dalam proses pemberdayaan potensinya.

Proses pendidikan pada intinya berlangsung di lembaga pendidikan secara berjenjang, baik pesantren, madrasah, maupun sekolah. Keberadaan suatu sekolah secara umum tujuan jangka panjangnya adalah dilandasi oleh motif agar menghasilkan lulusan yang memiliki nilai manfaat pendidikan bagi *stakeholders* yang meliputi pemerintah, pimpinan lembaga, karyawan, guru atau pendidik, mitra, serta kelompok masyarakat secara umum. Agar nilai manfaat tersebut dapat terwujud, sekolah diharapkan mempunyai visi, misi, tujuan, strategi, program kerja yang terencana, terfokus dan berkesinambungan.

Aspek penting yang harus dipersiapkan agar tujuan pendidikan dalam jangka panjang bagi sekolah tersebut adalah diperlukan sumber daya pendukung yang memadai dalam bentuk 4 (empat) pilar utama yaitu SDM yang berkualitas, memiliki sistem yang kuat dengan didukung perangkat teknologi yang terpadu,

memiliki strategi tepat, serta adanya kekuatan logistik yang cukup. Dari keempat pilar tersebut, aspek yang paling utama untuk menopang keberhasilan tujuan jangka panjang sekolah adalah tersedianya sumber daya yang kuat karena memiliki peran atau kontribusi yang sangat sentral dan strategis agar output dari proses pendidikan dapat dimanfaatkan oleh pengguna.

Perguruan tinggi sebagai salah satu jenjang satuan pendidikan mempunyai kedudukan yang penting di masyarakat dan tidak hanya sekedar tempat mempelajari ilmu pengetahuan, melainkan agen perubahan yang dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan baik skala nasional maupun pembangunan daerah.

Oleh karena itu, perguruan tinggi tidak boleh “menara gading” (ivory tower), melainkan ibarat lentera yang dapat menerangi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Dedi Supriadi, menekankan bahwa pada tingkat perguruan tinggi peningkatan kuantitas dengan relevansi dan kualitas perlu sejalan. Untuk menempuh itu, beberapa kemungkinan dapat dilakukan sebagai berikut:

*Pertama*, peningkatan kapasitas mahasiswa seyogyanya diarahkan kepada bidang-bidang yang benar-benar relevan; *Kedua*, prinsip keterkaitan dan kesepadanan dalam arti kemampuan dan keterampilan, bidang keahlian dan kualitas lulusan perlu benar-benar diprioritaskan pada jenjang pendidikan tinggi; *Ketiga*, peningkatan kualitas dosen <sup>1</sup>.

Persoalan utama dalam bidang pendidikan adalah rendahnya mutu pendidikan. Berbagai hasil penelitian memperlihatkan fakta ini, antara lain: Survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh Programme for International Student Assessment (PISA) menyimpulkan bahwa mutu sistem pendidikan Indonesia berada di urutan ke 72 dari 77 negara yang diurutkan dan menempati peringkat ke-6 di ASEAN <sup>2</sup>.

Mutu pendidikan yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, (1) tidak konsekuennya dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional; (2) pendidikan diselenggarakan secara birokratis sentralistik; dan (3)

---

<sup>1</sup> Dedi Supriadi, *Isu Dan Agenda Pendidikan Tinggi Di Indonesia* (Bandung: Rosdakarya, 1997).

<sup>2</sup> Siti Alifah, “Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Mengejar Ketertinggalan Dari Negara Lain,” *Cermin: Jurnal Penelitian* 5, no. 1 (2021).

peran masyarakat dan birokrasi<sup>3</sup>. Sehingga peran serta masyarakat terutama orang tua sangat minim dalam penyelenggaraan pendidikan<sup>4</sup>.

Untuk mengatasi masalah mutu pendidikan tersebut, kebijakan yang ditempuh adalah otonomi pendidikan. Kebijakan ini menentukan bahwa lembaga pendidikan dituntut mengadopsi bagian-bagian terpenting kondisi dan potensi daerahnya masing-masing. Pentingnya akuntabilitas<sup>5</sup>, sehingga tanggung jawab mutu terhadap masyarakat terutama *stakeholders* menjadi sebuah keharusan bagi lembaga pendidikan<sup>6</sup>.

Keharusan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada publik tersebut sangat tampak pada institusi pendidikan tinggi. Paradigma baru yang diharapkan mampu menguatkan kualitas perguruan tinggi bertumpu pada pilar berikut, yaitu: (1) kualitas, (2) otonomi, (3) akuntabilitas, (4) akreditasi, (5) evaluasi diri, (6) nirlaba, (7), partisipasi atas tanggungjawab negara (8), berkelanjutan, (9), akses yang berkeadilan dan (10) penjamin mutu<sup>7</sup>. Paradigma tersebut merupakan pra-kondisi yang dipersyaratkan bagi fungsi pendidikan tinggi dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di masa depan.

Kecenderungan dinamika pendidikan tinggi yang semakin mengarah pada demokratisasi dan desentralisasi dapat diartikan sebagai tuntutan kepada jajaran pimpinan perguruan tinggi untuk lebih serius menjadikan sivitas akademika sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan potensi wilayah, baik dari segi ekonomi, politik, maupun budaya. Dengan demikian kurikulum lokal sebaiknya diperbesar, sehingga mendekatkan dunia kampus dengan kesempatan dan tantangan pembangunan wilayah masing-masing.

---

<sup>3</sup> A. Rusdiana, "Akuntabilitas Perguruan Tinggi Islam Swasta," *Media Pendidikan: Jurnal Pendidikan Islam* XXVIII, no. 3 (2013).

<sup>4</sup> Ismail Izzah, "Aktualisasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah," *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/attalim.v4i2.59>.

<sup>5</sup> Heni Sukrisno, "Akuntabilitas Mutu Pelayanan Perguruan Tinggi," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 18, no. 1 (2011).

<sup>6</sup> Marus Suti, "Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan," *MEDTEK* 3, no. 2 (2011).

<sup>7</sup> Seriawan Wijayatno, *Pengelolaan Perguruan Tinggi Yang Efektif, Efesien Dan Ekonomis* (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

Sementara itu, pembangunan daerah bertujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dituntut peran aktifnya masyarakat serta pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Pada pelaksanaannya sistem pembangunan ini pada awalnya menganut paham bahwa system pemerintahan diatur dari pusat, dan pemerintah daerah adalah pelaksana dan tidak mempunyai wewenang untuk mengelola wilayahnya sendiri, namun sejak diterapkannya otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri, kecuali masalah politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama<sup>8</sup>.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan di atas, antara perguruan tinggi dengan penyelenggaraan pembangunan daerah terkesan berjalan masing-masing dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dengan berbagai aturan mengharuskan menjalankannya sesuai dengan undang-undang otonomi daerah yang tidak secara langsung mengelola perguruan tinggi, tetapi sebatas pendidikan dasar dan menengah, di lain pihak penyelenggaraan perguruan tinggi dengan sentralistiknya berjalan sendiri, sehingga antara perguruan tinggi dengan pembangunan daerah terkesan menara gading.

Titik-temu dari relasi perguruan tinggi dan pemerintah daerah terletak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencakup tiga komponen, yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli. Hal ini sesuai yang diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yang pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia. Namun demikian dalam rencana pelaksanaan penelitian ini, pembangunan daerah lebih difokuskan pada pembangunan dibidang pendidikan sesuai dengan kapasitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta sebagai institusi pendidikan. Sejalan dengan itu maka tujuan penelitian ini difokuskan pada Indeks Pendidikan dengan indikator: Angka Harapan Lama Sekolah/HRL) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) walaupun pada kenyataannya pendidikan itu selalu berkorelasi dengan ketiga indikator IPM. Perlu juga dijelaskan bahwa indeks pendidikan dalam kontek pembangunan daerah pada

---

<sup>8</sup> Ara Hidayat and Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan; Konsep, Prinsip Dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah Dan Madrasah*, ed. Pendi Susanto (Bandung: Pustaka Educa, 2010).

penelitian ini tidak hanya didasarkan kepada kuantitatif tetapi lebih pada kualitatif yang berkenaan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam di Sukabumi dalam penyelenggaraannya dapat memberikan dampak terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.

Sebagai ilustrasi indeks pendidikan, yaitu: akselerasi indeks pendidikan dengan prioritas program seperti (1) Penuntasan Pemberantasan Buta Aksara melalui Keaksaraan Fungsional Program 32 Jam, (2) Tahap Pembinaan dan Pelestarian, Pasca Penuntasan Buta Aksara (3) Bantuan Operasional Siswa (BOS) Tingkat Provinsi dan Pusat (4) Peningkatan Daya Tampung melalui Perbaikan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah, (5) Pencanangan Wajib Belajar 12 Tahun di Seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Barat, (6) Beasiswa Pendidikan Menengah dan Tinggi Bagi Siswa/Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu, (7) Program Pendidikan Kelas 1 s.d. 9 dalam Rangka Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah, (8) Penyelenggaraan Paket B dan C Secara Massal.

Kabupaten Sukabumi, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat ternyata memiliki nilai IPM yang rendah dalam posisi provinsi Jawa Barat. BPS mencatat, IPM Kabupaten Sukabumi tahun 2020 yaitu 66,88 dan berada di tingkat 24 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. IPM ini mengalami kenaikan yang semula tahun 2019 sebesar 66,67. Beberapa indikator yang menyumbang naiknya IPM adalah harapan hidup, pendidikan, dan pengeluaran. Pada sektor pendidikan, IPM Pendidikan Kabupaten Sukabumi yaitu 9,65 dengan rata rata lama sekolah menjadi 7,07 tahun dan harapan lama sekolah 12,23. Yang menjadi PR adalah rata rata lama sekolah yang harusnya terus meningkat. Karena kalau rata-rata lama sekolah 7,07 tahun, artinya itu sampai kelas 1 SMP.

Tabel 1.1  
**Indek Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2020**

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah	IPM Pendidikan
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>12,50</b>	<b>8,55</b>	<b>21,05</b>	<b>10,53</b>
1	Kota Depok	13,92	11,28	25,20	<b>12,60</b>
2	Kota Bekasi	14,00	11,16	25,16	<b>12,58</b>

3	Kota Bandung	14,20	10,75	24,95	<b>12,48</b>
4	Kota Cimahi	13,80	10,96	24,76	<b>12,38</b>
5	Kota Bogor	13,41	10,33	23,74	<b>11,87</b>
6	Kota Sukabumi	13,47	9,59	23,06	<b>11,53</b>
7	Kota Cirebon	13,12	9,91	23,03	<b>11,52</b>
8	Kota Tasikmalaya	13,45	9,33	22,78	<b>11,39</b>
9	Bekasi	13,09	9,12	22,21	<b>11,11</b>
10	Kota Banjar	13,23	8,63	21,86	<b>10,93</b>
11	Ciamis	14,06	7,70	21,76	<b>10,88</b>
12	Bandung	12,69	8,96	21,65	<b>10,83</b>
13	Sumedang	12,97	8,51	21,48	<b>10,74</b>
14	Bogor	12,48	8,30	20,78	<b>10,39</b>
15	Purwakarta	12,11	8,09	20,20	<b>10,10</b>
16	Bandung Barat	11,87	8,19	20,06	<b>10,03</b>
17	Tasikmalaya	12,53	7,35	19,88	<b>9,94</b>
18	Karawang	12,09	7,77	19,86	<b>9,93</b>
19	Pangandaran	12,07	7,74	19,81	<b>9,91</b>
20	Kuningan	12,22	7,57	19,79	<b>9,90</b>
21	Majalengka	12,22	7,27	19,49	<b>9,75</b>
22	Garut	11,91	7,52	19,43	<b>9,72</b>
23	Sukabumi	12,23	7,07	19,30	<b>9,65</b>
24	Cianjur	11,99	7,18	19,17	<b>9,59</b>
25	Cirebon	12,25	6,92	19,17	<b>9,59</b>
26	Subang	11,70	7,10	18,80	<b>9,40</b>
27	Indramayu	12,25	6,30	18,55	<b>9,28</b>

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel 1 tersebut, Indeks Pembangunan Manusia bidang pendidikan Kabupaten Sukabumi masih rendah dan posisinya masih belum menyentuh IPM Pendidikan Provinsi Jawa Barat, meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tidak tercapainya IPM tersebut, mengindikasikan adanya masalah di dalam pembangunan IPM Pendidikan di Kabupaten Sukabumi ini. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan menimbulkan bertambahnya tingkat pengangguran yang berujung pada rendahnya kesejahteraan penduduk serta akan berdampak pada tidak optimalnya IPM Kabupaten tersebut.

Dalam konteks ini, sumbangan Pendidikan Tinggi bagi pengembangan akses pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat tentu sangat signifikan. Pendidikan tentu tidak mungkin dapat dilaksanakan seluruhnya oleh pemerintah, sebab jangkauan tangan pemerintah sangat terbatas. Pemerintah tentu tidak bisa

mendirikan semua lembaga pendidikan negeri karena keterbatasan anggaran dan juga SDM. Jika pelaksanaan pendidikan semuanya dilaksanakan oleh pemerintah, maka dapat dipastikan bahwa beban pemerintah tentu sangat berat. Tidak mungkin semua lembaga pendidikan dinegerikan. Terkait dengan hal ini, maka pemerintah kemudian memberikan sebagian wewenangnya kepada lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh perorangan atau yayasan yang memiliki kualifikasi secara memadai untuk menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian, maka keberadaan lembaga pendidikan swasta tentu menjadi sangat penting.

Kemajuan dari kemitraan strategis antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah tidak mungkin dicapai melalui mekanisme perencanaan yang bersifat *top down*, namun dengan meyakinkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan daerah-pelaksana pendidikan dan pelatihan, organisasi pekerja, asosiasi perdagangan, pasar kerja, pendidik dan peserta didik yang saling memahami peran masing-masing dan faktor-faktor yang menguatkan keterlibatan lebih aktif dalam pembangunan daerah dengan mengacu pada tiga bentuk kolaborasi tersebut di atas.

Secara sistemis, Perguruan Tinggi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi. Pada saat yang bersamaan, Perguruan Tinggi Swasta merupakan subsistem dari sistem yang lebih luas, yaitu masyarakat Sukabumi. Perguruan tinggi sebagai lembaga publik yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan masyarakat. Hal tersebut bukan hanya menerima input dari lingkungan masyarakat, tetapi perguruan tinggi secara fakta menghasilkan lulusan generasi terdidik yang berpengaruh dalam membangun lingkungan masyarakat itu sendiri<sup>9</sup>. Lulusan perguruan tinggi sebagai manusia terdidik dalam makna sosiologisnya telah tersirat dalam al-Qur'an surat Al-Nisa (4) ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

<sup>9</sup> Mahmud, *Manajemen Pendidikan Tinggi Berbasis Nilai-Nilai Spiritual*, ed. Dindin Jamaluddin (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019:27).

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Berdasarkan petunjuk ayat tersebut, manusia sebagai makhluk yang berakal, yang berperan sebagai subjek kebudayaan. Mereka pada dasarnya tidak bisa hidup kecuali bersosialisasi, dimana satu sama lainnya saling bergantung dan saling membutuhkan. Agar tercipta suasana yang harmonis dalam kehidupannya, maka harus memperhatikan etika hidup sosial yang mencakup: (1) berkooperasi dalam kebaikan, (2) tidak berlaku congkak, bersikap arif seperti mengejek orang lain <sup>10</sup>.

Dalam konteks ini, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah Sukabumi mempunyai hubungan simbiosis. Oleh karena itu, keberadaan perguruan tinggi di setiap daerah mempunyai peranan yang penting dalam membangun daerahnya terutama dalam bidang pendidikan.

Tugas utama Pemerintah Kabupaten Sukabumi mencakup bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Salah satu aspek terpenting dalam pembangunan adalah pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ketiganya komponen utama dari Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukabumi. Sehubungan dengan indeks pembangunan tersebut maka kontribusi Pendidikan Tinggi tidak dapat diabaikan.

Di Sukabumi, terdapat 9 (sembilan) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dengan berbagai peringkat akreditasinya. Kesembilan PT tersebut adalah: STAI Kharisma Cicurug Sukabumi, STAI Al-Masthuriyah Cisaat Sukabumi, STAI Pelabuhanratu Sukabumi, STAI Darussalaam Cisaat Sukabumi, STAI Al-Mas'udiyah Nyalindung Sukabumi, STAI Al-Andina Cicantayan Sukabumi, STAI Sukabumi, STAI Syamsul Ulum Sukabumi, dan Institut Agama Islam Sukabumi (IAIS) Kadudampit Sukabumi.

---

<sup>10</sup> Maman Karman, *TAFSIR TARBAWI* (Bogor: Hilliana Press, 2016:49).



Secara normatif, terdapat sinergi antara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dengan pemerintah daerah. Sehingga dapat mempercepat pencapaian pembangunan, khususnya peningkatan indeks pembangunan manusia di Sukabumi. Sekalipun demikian, karena berbagai faktor, hubungan tersebut kurang atau belum optimal, sehingga kontribusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta terhadap pembangunan daerah, tidak teridentifikasi dan dinilai belum optimal.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, peneliti berpendapat bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi masih rendah, padahal jumlah perguruan tinggi khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Kabupaten Sukabumi cukup memadai. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta belum memberikan kontribusi signifikan sehingga dampaknya terhadap peningkatan IPM dirasa belum optimal. Dengan demikian permasalahan penelitian (*research problem*) ini adalah indeks pembangunan manusia Kabupaten Sukabumi masih rendah, sebagian, diduga karena kontribusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta belum signifikan.

Mengacu pada identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi objektif STAI Kharisma Cicurug Sukabumi, STAI Darussalaam Cisaat Sukabumi, dan STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi?
2. Bagaimana kebijakan STAI Kharisma Cicurug Sukabumi, STAI Darussalaam Cisaat Sukabumi, dan STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi untuk mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan STAI Kharisma Cicurug Sukabumi, STAI Darussalaam Cisaat Sukabumi, dan STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi untuk mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia Kabupaten Sukabumi?

4. Bagaimana Hasil penyelenggaraan STAI Kharisma Cicurug Sukabumi, STAI Darussalaam Cisaat Sukabumi, dan STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi untuk mendukung meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi?
5. Apa faktor pendukung dan penghambat STAI Kharisma Cicurug Sukabumi, STAI Darussalaam Cisaat Sukabumi, dan STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi dalam upaya mendukung meningkatkan indeks pembangunan manusia Kabupaten Sukabumi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tentang:

1. Kondisi objektif STAI Kharisma Cicurug Sukabumi, STAI Darussalaam Sukabumi, dan STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi.
2. Kebijakan STAI Kharisma Cicurug Sukabumi, STAI Darussalam Sukabumi, dan STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi dalam mendukung meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi.
3. Upaya-upaya yang dilakukan STAI Kharisma Cicurug Sukabumi, STAI Darussalam Sukabumi, dan STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi dalam mendukung meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi.
4. Hasil penyelenggaraan STAI Kharisma Cicurug Sukabumi, STAI Darussalaam Cisaat Sukabumi, dan STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi untuk mendukung meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi.
5. Faktor pendukung dan penghambat STAI Kharisma Cicurug Sukabumi, STAI Darussalaam Sukabumi, dan STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi dalam upaya mendukung meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

### **a. Manfaat Teoretis**

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat ditemukannya model kontribusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang dapat mendukung meningkatkan indeks pembangunan manusia.

### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis (*research setting*) hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan atau masukan bagi seluruh *stakeholders* terkait dengan kontribusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## **E. Kerangka Berpikir**

### **1. Fungsi Pendidikan dalam Era Globalisasi**

Kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan daerah telah dibahas pada *World Conference on Higher Education, Higher Education in the Twenty-first Century: Vision and Action*, yang diselenggarakan oleh UNESCO di Paris pada tanggal 5-9 Oktober 1998. Salah satu tema perdebatannya adalah “*Contributing to National and Regional Development*”.

Selain intervensi regional dan lokal semakin penting bagi keberhasilan ekonomi, juga terjadi pergeseran kualitatif dalam bentuk kebijakan lokal berkenaan dengan inovasi dan kewirausahaan masyarakat di daerah, serta memberikan suatu lingkungan yang kondusif bagi mobilitas modal dalam meningkatkan nilai-nilai lokal (penelitian dan pengembangan serta pekerjaan dengan status lebih tinggi telah menjadi usaha yang semakin marak dan sukses). Ini mengarah pada perhatian yang lebih besar atas keterkaitan pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi dengan tujuan-tujuan sosial dan ekonomi tertentu.

Di manapun tuntutan ini lebih tegas dibandingkan dengan pembangunan daerah. Sementara perguruan tinggi-perguruan tinggi berada di daerah, pertanyaan yang sering diajukan adalah apa kontribusi mereka terhadap pembangunan di daerah tersebut? Sementara dimungkinkan untuk mengidentifikasi dampak besar perguruan tinggi berdasarkan lapangan kerja secara langsung ataupun tidak,

masalahnya bagaimana sumber daya perguruan tinggi dimobilisasi untuk dapat memberikan sumbangan secara aktif bagi proses pembangunan?

Hal ini mengimplikasikan sebuah pemahaman yang lebih baik mengenai perguruan tinggi sebagai bagian dari pelaku dan agen pembangunan sehingga dinamika daerah menjadi bagian tak terpisahkan dari perguruan tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan menilai kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan perguruan tinggi yang relevan serta merupakan kemitraan strategis antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah. Karena berbagai alasan, pemerintah daerah saja kurang mampu mengartikulasikan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan daerahnya. Untuk mengatasi hal itu, perguruan tinggi dituntut untuk melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pembangunan daerah (misalnya pimpinan daerah terpilih, pengusaha dan organisasi pekerja, media massa di daerah).

Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pada Pasal 48 mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerjasama antar Perguruan Tinggi dan antar Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industry, dan masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Lebih lanjut pada pasal 62 disebutkan bahwa Pendidikan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri dharma. Pengelolaan tersebut merupakan bentuk inovasi Perguruan Tinggi untuk ikut serta dalam pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 24 Tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Kurikulum Pasal 1 bahwa inovasi Perguruan Tinggi bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Sedangkan aspek yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 13 diantaranya adalah penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial dengan tujuan agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Hal ini lebih ditegaskan di Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Pasal 81 bahwa pemerintah

dan pemerintah daerah mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 (satu) Akademi Komunitas dalam bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah di kabupaten/kota dan/atau di daerah perbatasan dengan tujuan untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, saat ini konsep kolaborasi dalam pembangunan daerah terus berkembang karena percepatan pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak apalagi oleh salah satu golongan. Khususnya untuk dekade ini muncul konsep *triple-helix*, *quadruple-helix*, dan *penta-helix*. Ketiga model kolaborasi ini menempatkan perguruan tinggi sebagai kontributor yang selalu harus menghadirkan kekuatan pengetahuan atau *knowledge fower*. Gagasan utama *triple-helix* adalah sinergi dan penyatuan tiga kekuatan yang terdiri dari perguruan tinggi, industry, dan pemerintah<sup>11</sup>. Sementara konsep *quadruple-helix* merupakan model inovasi yang menekankan pada kerjasama antara empat unsur ke dalam aktivitas kreatifitas dan pengetahuan yaitu pemerintah, pengusaha, akademisi atau perguruan tinggi, dan masyarakat atau komunitas<sup>12</sup>. Adapun konsep *penta-helix* merupakan model yang dikembangkan untuk menjalin kolaborasi lima unsur agar bersatu membangun inovasi dan berkolaborasi dalam kebersamaan yaitu pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media<sup>13</sup>.

Beberapa hasil konferensi dunia mengenai perguruan tinggi, khususnya kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan daerah, adalah:

a. Kontribusi perguruan tinggi bagi pembangunan sosial budaya di daerah.

Perguruan tinggi dituntut untuk menggabungkan diri pada tingkat nasional dan daerah untuk melaksanakan kemitraan antara perguruan tinggi dengan pemerintah. Kontribusi perguruan tinggi bagi pembangunan daerah bergantung pada alih pengetahuan atau hasil penelitian dalam sektor ekonomi, dengan pengaturan yang tepat dan melalui penguatan rasa saling percaya antara

<sup>11</sup> Aan Jaelani, "The Triple Helix as A Model For Innovation Of Higher Education: Analysis of Institutional Logic in Entrepreneurship and Economic Development," 2019.

<sup>12</sup> Sri Wahyu Lelly Hana Setyanti, "Peran Quadruple Helix Untuk Meningkatkan Kreatifitas Dan Kinerja Inovasi Industri Kreatif Indonesia," 2018.

<sup>13</sup> Novy Setia Yunas, "Implementasi Konsep Penta Helix Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa Di Provinsi Jawa Timur," *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 3, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.21787/mp.2.1.2018.1-13>.

perguruan tinggi dengan industri melalui kemitraan strategis. Di pihak pemerintah daerah, adanya tuntutan untuk mendesentralisasikan pembuatan keputusan sehingga dampak nyata dari usaha perguruan tinggi dalam pembangunan daerah dapat diketahui.

b. Kontribusi pendidikan tinggi bagi pembangunan sosial ekonomi

1. Dalam istilah umum, perguruan tinggi diharapkan memahami dan berbagi dalam mengidentifikasi dan memecahkan persoalan di daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan. Mereka dapat mengembangkan bank data untuk tujuan pemberdayaan. Tuntutan untuk mengembangkan indikator dari jenjang perguruan tinggi adalah dampak sosial ekonomi bagi masyarakat di daerah. Perguruan tinggi pun dituntut untuk memperluas pengetahuan komparatif pada tahap institusional.

2. Dengan mengacu pada teknologi baru, perguruan tinggi dituntut untuk memfasilitasi alih pengetahuan pada masyarakat dan memenuhi kebutuhan para pengusaha berupa pembelajaran khusus dan pelatihan profesional. Perguruan tinggi diharapkan memainkan peran yang lebih penting dalam penyempurnaan teknologi dan pengalihan dari tingkat daerah ke pusat.

3. Harapan lain atas peran/kontribusi perguruan tinggi berkaitan dengan keseimbangan antara pemangku kepentingan dari sektor publik dengan sektor pribadi. Perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi mediator antara komunitas-komunitas lokal dengan para pembuat keputusan. Mereka harus menciptakan infrastruktur dalam meningkatkan kontribusi akademis bagi pembangunan komunitas. Partisipasi perguruan tinggi dalam kegiatan daerah dapat ditingkatkan dengan mendaftarkan para mahasiswa yang berperan serta secara aktif dalam sektor publik di tingkat lokal.

c. Penyempurnaan strategi dan pelaksanaan Pendidikan Tinggi

1) Pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi perlu memasukkan nilai-nilai etika dan menghormati lingkungan sehingga melahirkan mahasiswa yang bertanggungjawab.

2) Program pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi diarahkan sedemikian rupa sehingga meningkatkan citra perguruan tinggi yang

bersangkutan sehingga mampu merespon secara cepat atas setiap perubahan dan tetap memberi kontribusi aktif bagi pembangunan daerah.

- 3) Pemerintah lokal pun dituntut agar memfasilitasi kerjasama pendanaan dan memberikan kontribusi keuangan.

Di Indonesia, kontribusi pendidikan tinggi bagi pembangunan daerah sangat dimungkinkan. Terutama, jika hal ini dikaitkan dengan otonomi pendidikan tinggi di satu pihak dan desentralisasi pemerintah daerah di pihak lain.

Kebijakan Pemerintah berkenaan dengan pendidikan tinggi secara umum didasarkan pada 3 pilar utama, yakni: (1) pemerataan dan perluasan akses; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing; (3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik <sup>14</sup>

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terwujud sedemikian rupa dengan karakteristik antara lain:

1. Terkait dengan kebutuhan peserta didik, prioritas nasional dan pembangunan ekonomi,
2. Terstruktur secara efektif sehingga memberi peluang kepada seluruh warga negara untuk mengembangkan potensi pribadi sepanjang hayat dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara,
3. Didukung dengan pendanaan yang memadai sehingga memungkinkan untuk berinovasi dan mencapai keunggulan,
4. Melakukan penelitian yang dapat menunjang pembangunan nasional,
5. Memiliki akses dalam pengembangan dan penerapan teknologi,
6. Berperan sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat demokratis yang madani.

Sementara itu, Samuelson & Nordhaus, mengatakan: *these four wheels, or factors of growth, are:*

1. *Human resources (labor supply, education, discipline, motivation);*
2. *Natural resources (land, minerals, fuels, environmental quality);*

---

<sup>14</sup> Ida Kintamani Dewi Hermawan, "Analisis Profil Pendidikan Tinggi Menurut Pilar Kebijakan: Kasus Provinsi Bali Tahun 2008/2009," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 16, no. 6 (2010).

3. *Capital formation (machines, factories, roads);*

4. *Technology (science, engineering, management, entrepreneurship)*<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat Samuelson dan Nordhaus bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia dan sumber daya manusia didalamnya berkaitan dengan peran pendidikan, kedisiplinan, motivasi dan ketersediaan tenaga kerja. Untuk mencapai itu dibutuhkan peran perguruan tinggi sebagai sarana menyiapkan sumber daya manusia tersebut.

Perguruan tinggi dituntut untuk memiliki kredibilitas institusional secara utuh dan menyeluruh. Oleh karenanya, perguruan tinggi hendaknya memiliki tanggungjawab yang tinggi terhadap masyarakat, efisien dalam operasionalnya, dapat menghasilkan lulusan dengan tingkat kualitas yang baik, serta memiliki pengelolaan yang transparan secara internal sehingga dapat mencapai memenuhi standar terbaik.

## **2. Prinsip-Prinsip Desentralisasi Pendidikan**

Ada dua jenis desentralisasi pendidikan secara konseptual, yaitu: (1) desentralisasi pendidikan yang fokus kebijakan dan aspek pendanaannya dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Konsep ini, erat kaitannya dengan otonomi daerah. (2) desentralisasi pendidikan yang fokus pada pemberian kewenangan pada tingkat satuan pendidikan, hal tersebut dilakukan dengan motivasi agar pada tingkat satuan pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikannya.

Desentralisasi pendidikan memiliki tujuan dan orientasi yang bervariasi hal tersebut berdasarkan pengalaman beberapa Negara di Amerika Latin, Amerika Serikat dan Eropa. Onisimus Amtu mengutip pendapat McGinn & Welsh (1999) ada lima alasan mendasar mengapa di berbagai negara bidang pendidikan didesentralisasikan, yakni: meningkatkan pendidikan secara langsung, meningkatkan pengoperasian sistem pendidikan, mengubah sumber-sumber dan jumlah dana yang tersedia untuk pendidikan, manfaat yang diperoleh pemerintah

---

<sup>15</sup> Samuelson dan Nordhaus, *Seventeenth Edition Economics*, Internatio, 2001.



pusat dengan cara: mengurangi kerumitan, dan manfaat pemerintah daerah dengan cara meningkatkan pendapatan untuk pendidikan<sup>16</sup>. Adapun tujuan daripada desentralisasi pendidikan dengan dilimpahkannya wewenang lebih besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang secara implisit hal tersebut dilakukan untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber dana pendidikan yang berasal dari masyarakat dan pemerintah.

Sementara itu, jika tujuan dari desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, maka fokus reformasinya adalah pada aspek perkuliahan dan partisipasi masyarakat khususnya orangtua menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam proses ini.

Realitasnya, desentralisasi pendidikan yang ditemukan di banyak negara merupakan dari proses reformasi pendidikan dan bukan hanya sekadar bagian dari proses otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Lebih dari itu, desentralisasi pendidikan merupakan proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dengan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersamaan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan pada tingkat satuan pendidikan.

Jika ditarik benang merahnya tentang desentralisasi pendidikan terhadap pengalaman negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (*Organization de cooperation et de development economiques*) dan beberapa negara di Amerika Latin misalnya; dapat disimpulkan bahwa pemberian kewenangan pada tingkat satuan pendidikan berkaitan dengan hal; penentuan buku pelajaran, metode pembelajaran, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan dan rencana pengembangan satuan pendidikan sehingga tidak tergantung pada pemerintah pusat maupun daerah<sup>17</sup>. Sementara di negara-negara Amerika Latin kewenangan kurikulum inti berada pada kewenangan pemerintah pusat, begitu pula dengan ujian-ujian dilakukan

---

<sup>16</sup> Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah, Konsep, Strategi Dan Implementasi* (Bandung: ALFABETA, 2011).

<sup>17</sup> Subijanto, "Prinsip-Prinsip Dan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Dan Relevansi Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 16, no. 5 (2010).

secara nasional, sehingga di negara-negara Amerika Latin tidak ada ketergantungan pada desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing negara.

Di negara-negara Amerika Latin pemberlakuan desentralisasi pendidikan merupakan bagian dari desentralisasi politik dan fiskal. Secara sistem pendidikan sentralistik ke desentralistik dimana pemerintah pusat memberikan kesewenangan kepada pemerintah daerah dengan melibatkan partipasi masyarakat. Adapun harapan dari desentralisasi pendidikan ini dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan.

Untuk mempersiapkan desentralisasi pendidikan tersebut, maka dapat diidentifikasi faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar-mengajar terutama pada satuan pendidikan unggulan. Secara umum, bahwa satuan pendidikan unggulan mempunyai karakteristik kepemimpinan yang kuat, staf pengajar dengan kualifikasi dan komitmen yang tinggi, fokus pada penguatan proses, dan hasil yang dicapainya dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya proses desentralisasi pendidikan baik pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam hal alokasi anggaran dan perencanaan pendidikan di daerah tersebut, maupun pelimpahan kewenangan pada tingkat satuan pendidikan dalam hal manajemen proses belajar-mengajar, pendanaan, pemilihan kepala satuan pendidikan dan pengelolaan proses diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

### **3. Hubungan antara Pendidikan Tinggi dengan Pembangunan Daerah**

Hubungan antara Perguruan Tinggi atau Universitas di Daerah dengan pemerintah daerah menurut Onisimus Amtu, adalah bersifat konsultatif. Sebab peran sebuah Perguruan Tinggi di daerah bersifat independen, namun kewajiban untuk menyiapkan sumber daya manusia yang bersifat profesional, memberikan masukan dan konstribusi pemikiran bagi pembangunan dan pengembangan pendidikan di daerah<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah, Konsep, Strategi Dan Implementasi*.

Dalam hubungan ini Perguruan Tinggi dapat berperan melakukan kajian dan studi sehingga melahirkan berbagai konsep dan strategi keilmuan yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan pada skala nasional maupun pada tingkat lokal. Oleh karena fungsinya bersifat konsultatif maka perguruan tinggi mutlak mengontrol, melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagai motor penggerak perubahan perguruan tinggi keberadaannya di daerah perlu mendapat perhatian pemerintah sebagai mitra konsultatif.

Adapun teori yang menjadi landasan untuk memecahkan masalah ini adalah sebagai berikut:

### **1. *Grand Theory*: Teori Sistem Nilas Luhmann**

Argumen dari teori system adalah bahwa hubungan dari bagian-bagian tidak dapat diperlakukan di luar konteks keseluruhan. Teori sistem menolak ide bahwa masyarakat atau komponen masyarakat berskala luas lainnya harus diperlakukan sebagai fakta sosial yang menyatu<sup>19</sup>. Menurut Mahmud (2019) bahwa secara sistemis, Perguruan Tinggi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi. Pada saat yang bersamaan, Perguruan Tinggi Swasta merupakan subsistem dari sistem yang lebih luas, yaitu masyarakat Sukabumi. Perguruan tinggi sebagai lembaga publik yang memiliki keterkaitan langsung dengan lingkungan masyarakat. Hal tersebut bukan hanya menerima input dari lingkungan masyarakat, tetapi perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan generasi terdidik yang berpengaruh dalam membangun lingkungan masyarakat itu sendiri<sup>20</sup>.

Dengan demikian, jika perguruan tinggi sebagai bagian dari sistem masyarakat dan dihubungkan dengan penelitian ini, maka proposisinya adalah semakin banyak perguruan tinggi di suatu daerah, maka akan semakin baik kualitas sumber daya manusia daerah itu. Salah satu indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan sumber daya manusia adalah IPM. Artinya semakin banyak

---

<sup>19</sup> Douglas J. Godman George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004:238).

<sup>20</sup> (Mahmud, 2019:96)

perguruan tinggi di suatu daerah, maka akan semakin baik indeks pembangunan manusia daerah tersebut.

### **2. *Middle Theory*:** Teori Triple Helix Etzkowitz

Triple Helix mengasumsikan bahwa potensi untuk inovasi dan pengembangan ekonomi dalam masyarakat pengetahuan terletak pada peran yang lebih menonjol bagi perguruan tinggi dan dalam hibridisasi unsur-unsur dari perguruan tinggi, industri dan pemerintah untuk menghasilkan format kelembagaan dan sosial baru untuk produksi, transfer dan penerapan pengetahuan. Lembaga riset yang mengembangkan konsep Triple Helix secara teoritis dan empiris secara signifikan telah berkembang selama dua dekade terakhir yang menyediakan kerangka kerja umum untuk mengeksplorasi dinamika inovasi yang kompleks dan untuk menginformasikan inovasi, pembuatan kebijakan pembangunan dan nasional, regional dan internasional.

Asumsi teori Triple Helix adalah pentingnya kolaborasi dalam pembangunan daerah karena percepatan pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak apalagi oleh salah satu golongan. Model kolaborasi ini menempatkan perguruan tinggi sebagai kontributor yang selalu harus menghadirkan kekuatan pengetahuan atau *knowledge fower*. Gagasan utama *triple-helix* adalah sinergi dan penyatuan tiga kekuatan yang terdiri dari perguruan tinggi, industri, dan pemerintah <sup>21</sup>. Industri dipahami sebagai sebuah kegiatan yang diurus atau dikelola dengan baik dan menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lembaga pendidikan seperti sekolah atau madrasah adalah termasuk industry karena lembaga pendidikan memberikan jasa berupa lulusan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

### **3. *Aplied Theory*:** Teori Peran Levinson

Teori Peran (*Role Theory*) adalah paduan dari berbagai teori, disiplin ilmu dan orientasi. Kata “peran” berasal dari istilah yang digunakan pada dunia teater, dimana seorang aktor hendak bermain dan memerankan tokoh tertentu sehingga sang aktor diharapkan dapat berperilaku tertentu. Berkaitan dengan teori ini,

---

<sup>21</sup> Aan Jaelani, “The Triple Helix as A Model For Innovation Of Higher Education: Analysis of Institutional Logic in Entrepreneurship and Economic Development.”

Levinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa: (1) peranan menyangkut norma-norma atau kebijakan diungkapkan dengan kedudukan seseorang pada suatu kelompok masyarakat. Hal ini merupakan serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, (2) peranan merupakan konsep yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi, (3) peranan dapat diartikan pula sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat<sup>22</sup>.

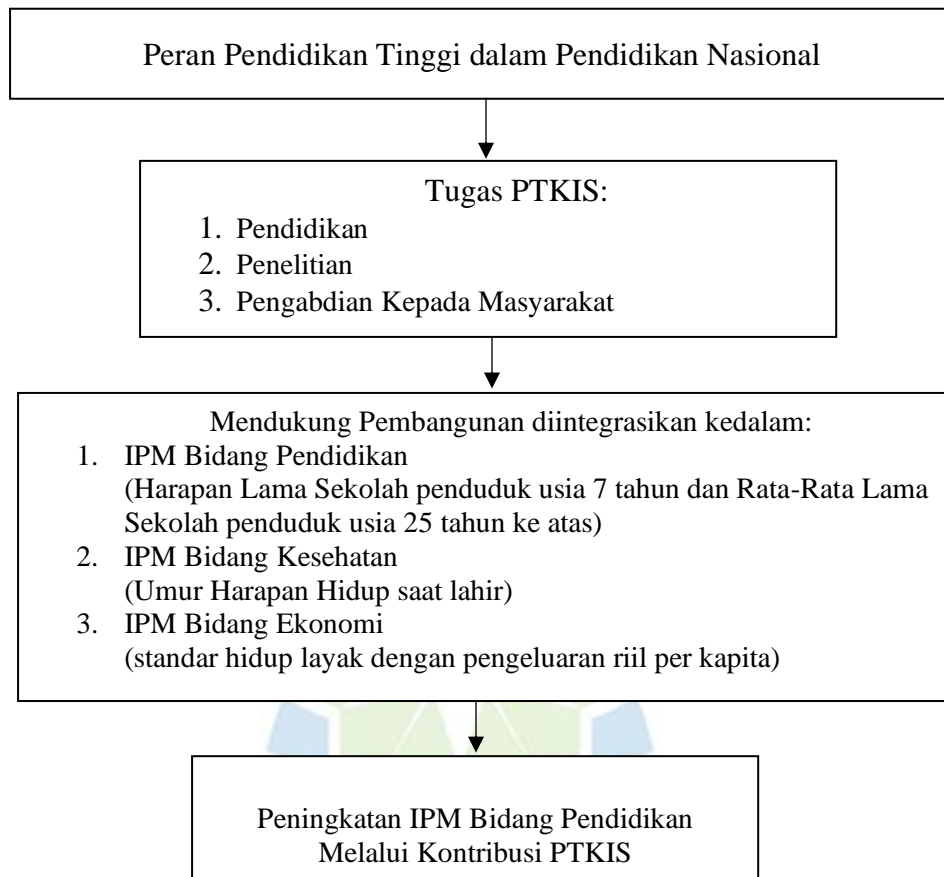
Sehubungan dengan masalah penelitian tentang Kontribusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, maka Peran dan tugas Perguruan Tinggi dipolakan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang Sistem pendidikan nasional Nomor 22 tahun 1961 yang mengamanatkan bahwa, Suatu Perguruan Tinggi mempunyai keharusan untuk melaksanakan tiga fungsi tersebut, yang menurut W Lusikooy ketiga fungsi tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan<sup>23</sup>. Hal tersebut sejalan dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa “*Pendidikan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.*”

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers Edisi Revisi, 2017).

<sup>23</sup> W Lusikooy, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Gunung Agung, 1982:4).

Untuk lebih jelasnya, kerangka berpikir disajikan pada bagan berikut:



Gambar. 1.1: Kerangka Berpikir